

KEKERASAN GENDER DALAM *BLAMING THE VICTIM* PADA MEDIA

Rekno Sulandjari *)

Abstract

In capitalism, all forms of production of commodities to be marketed for profit. The power production of use values established not dig, but to look for more value and exchange value. So the rationalization and commodification of culture is a manifestation of false enlightenment not only inhibits the aspirations and creativity of individuals, but also remove the human dream of freedom and true happiness. So that was often found in the preaching of violence in the mass media. Many victims of violence, both sexually and physically and psychologically to get treatment is not balanced in its presentation. Not only get a balanced treatment in news, but instead they are often blamed for the violent incident. Even considered as a cause or trigger of the violence occurs is known as blaming the victim. Surprisingly, this often happened to women. So it is necessary a solution to a similar incident does not happen again in our mass media in the next mass.

Keywords: commodity, blaming the victim, the solution

I.PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang Masalah

Rata-rata pembaca bertemu dengan isu kekerasan setiap dua hari sekali. Frekuensi pemberitaan isu perempuan di koran adalah antara 6 hingga 24 liputan setiap bulannya. Pemberitaan isu perempuan meningkat jika ada isu yang sensasional, atau terkait dengan tokoh publik, atau dalam rangkaian peringatan peristiwa tertentu. Situasi ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan hasil kajian atas pemberitaan isu perempuan di 8 koran sepanjang tahun 2010. Kedelapan koran tersebut adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pos Kota, Republika, Seputar Indonesia, The Jakarta Globe dan The Jakarta Post. Komnas Perempuan mencatat adanya 1278 berita tentang isu perempuan. Sebagian besar dari berita tersebut adalah tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu 528 berita, dan 375 berita diantaranya adalah tentang kekerasan seksual. 83% dari berita tentang isu

*) Dosen Jurusan Hubungan Masyarakat FISIP Universitas Pandanaran

perempuan telah memenuhi etika jurnalistik. Bila digabung dengan pemenuhan hak korban, persentasi pemenuhannya turun menjadi 69%. Namun persentasi ini turun drastis menjadi hanya 50% dalam pemberitaan isu kekerasan seksual,” demikian ungkap Nunung Qomariyah, asisten koordinator Sub.Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan yang mengoordinir kajian media tersebut (Sumber [Http://www.komnasperempuan.or.id/2011/06/catatan-akhir-tahun-ktp-2010/](http://www.komnasperempuan.or.id/2011/06/catatan-akhir-tahun-ktp-2010/) diunduh pada tanggal 12 November 2011 pk.08.10 WIB).

Pelanggaran terbanyak dari kode etik dan hak korban adalah pengungkapan identitas korban, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh publik. Dalam kasus kriminalisasi, dimana perempuan dituduh melanggar kebijakan yang diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Pengungkapan identitas tersebut bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. “Media, pemerintah, aparat penegak hukum dan organisasi hak asasi manusia harus duduk bersama untuk merumuskan pedoman bagi pekerja media dalam memberitakan kasus-kasus serupa ini agar tidak melanggar hak setiap orang atas perlindungan hukum,” ujar Arimbi Heroepoetri, Komisioner Komnas Perempuan. Laporan kajian media Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa pemenuhan etika media dan hak korban dalam pemberitaan kekerasan seksual memainkan peran penting dalam memutus budaya penyangkalan, sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan stigmatisasi pada korban yang kerap membungkam korban perempuan. Meski baru 50% pemberitaan yang memenuhi standar tersebut, hanya ada 2 dari 49 berita perkosaan yang masih menyalahkan korban.

Apa yang menjadi berita adalah peristiwa yang lebih spektakuler dari peristiwa lainnya pada waktu dan tempat yang sama. Yang spektakuler adalah sesuatu peristiwa yang melampaui pengalaman keseharian orang kebanyakan. Atau sebuah peristiwa yang memiliki signifikan yang tinggi terhadap kepentingan banyak orang. Sehingga peristiwa serangan Rusia terhadap Georgia lebih menarik dibandingkan dengan peristiwa perdagangan manusia yang juga terjadi di Georgia atau Rusia pada waktu bersamaan, misalnya. Kelemahan lain dari media adalah

berita yang dipaparkan tidak sepenuhnya bebas distorsi. Yang kita saksikan di media cetak, media elektronik ataupun media *on line* mengacu dengan apa yang dilihat dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh reporter. Sangatlah jarang sang reporter berupaya membeberkan fakta apa adanya, tanpa bertujuan mendukung sebuah pendirian. Atau media tersebut menggariskan sebuah alur fakta yang harus disampaikan. Berita yang temanya telah ditentukan dari awalnya akan berdampak terhadap sortir-menyortir berita serta penentuan cuplikan yang ingin diambil. Reporter yang telah memiliki anggapan bahwa seorang perempuan disamakan dengan sebutan nama bunga, cukup mengambil klip sebuah bunga yang dihisap madunya oleh kumbang. Dan hal tersebut adalah merupakan hal yang wajar menurut para jurnalis.

Jurnalisme kontemporer memiliki misi menampilkan berita secara akurat, objektif dan lepas dari sudut pandang pribadi. Namun hal tersebut sulit terwujud dikarenakan setiap peliput berita (jurnalis) memiliki kriteria dan sudut pandang tertentu ketika memperoleh informasi dan melakukan evaluasi, baik disadari maupun tidak disadari. Serta melakukan proses penyaringan dan pengemasan berita sebelum disajikan kepada *audience*. Jadi apa yang disebut kebenaran berita lebih merupakan pilihan sang reporter tentang apa yang perlu ditampilkan, dan hal ini sangat dipengaruhi juga para kapitalis media dalam hal ini pemilik media itu sendiri, berikut kroni-kroninya yang berkuasa dalam pemerintahan saat itu. Hal ini sangat sesuai dengan teori yang disampaikan oleh para pakar kajian budaya Sekolah Frankfurt yang mengartikulasikan sebuah teori terhadap keadaan negara dan monopoli kapitalisme yang dominan selama 1930-an. Ini adalah masa ketika negara dan perusahaan besar mengontrol penuh ekonomi dan individu menjadi subordinat. Periode ini sering disebut sebagai fordisme, untuk menunjuk pada sistem produksi massa dan homogenisasi rezim kapital yang menghasilkan keinginan, rasa, dan perilaku massa. Di sini budaya dan komunikasi massa menjadi instrumen dalam membentuk ajaran dan perilaku yang tepat bagi perilaku sosial. Model Sekolah Frankfurt tentang industri budaya mengartikulasikan peran penting sosial dari budaya media selama rezim kapital, dan memberikan model yang dapat memajukan budaya yang melayani kebutuhan korporasi dominan, memainkan

peran penting dalam reproduksi ideologi, dan inkulturasi individual dalam sistem dominan atas kebutuhan, ajaran, dan perilaku.

Sesuai dengan kegiatan *blaming the victim* yang terjadi pada media kita, di mana di dalamnya masih mengandung beberapa budaya yang mana pemberitaannya masih melayani kebutuhan korporasi dominan dalam hal ini para majikan dan pelaku kejahatan korban *blaming the victim* itu sendiri. Sementara tradisi utama studi budaya mengombinasikan teori sosial, kritik budaya, sejarah, analisa filsafat, dan intervensi politik spesifik, sehingga mengatasi standar akademik yang ada. Karena itu studi budaya harus menggunakan konsepsi transdisipliner yang menggabungkan antara teori sosial, studi ekonomi, politik, sejarah, dan komunikasi, teori leteral dan budaya, filsafat, serta diskursus yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Sekolah Frankfurt, Studi Budaya Inggris, dan teori post-modern Perancis. Oleh karenanya, seseorang tidak dapat berhenti pada teks ataupun inter-tekstualitas, tetapi harus bergerak dari teks ke konteks, ke dalam budaya dan masyarakat yang menyusun teks, dimana diperlukan pembacaan dan interpretasi. Tentang ini Raymond Williams melihat adanya interkoneksi antara budaya dan komunikasi, dan hubungan keduanya dengan masyarakat sebagai tempat memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi.

Yang terakhir ini juga mengatasi yang pertama dalam hal *audience* pasif dan menggantinya dengan *audience* aktif, sebagaimana penonton sebuah pertandingan olahraga dapat mengkritik dan menganalisis pertandingan yang ditontonnya. Namun demikian, dalam kasus *blaming the victim* hanya individu-individu tertentu saja yang bisa merasakan ketimpangan tersebut sebagai masalah sosial, utamanya yang sensitif terhadap gender. Meski pendekatan Sekolah Frankfurt pada dirinya sendiri masih parsial dan terlihat satu sisi, namun ia telah memberikan alat kritik terhadap bentuk ideologi dari budaya media. Kritik ideologi adalah bagian penting dari studi budaya, dan Sekolah Frankfurt memiliki jasa besar dalam melapangkan dan menyediakan kritik ideologi dalam industri budaya. Hal ini secara khusus berguna dalam menyediakan kontekstualisasi kritik budaya. Karena itu, studi komunikasi dan budaya menjadi bagian penting dari teori

masyarakat kontemporer, dimana budaya dan komunikasi memainkan peran signifikan, dan Sekolah Frankfurt telah menyediakan perspektif yang mencerahkan terhadap studi ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa distorsi media dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat signifikan diantaranya yaitu : (1) Fungsi industrialisasi sebagai dampak langsung dari era globalisasi sehingga perputaran ekonomi komersial lebih diutamakan dari pada nilai-nilai manusiawi (2) Nilai berita yang dimuat adalah mendahulukan sisi spektakuler dibanding yang lebih humanis (3) Tuntutan persaingan media khususnya *on-line* (4) Tuntutan para petinggi kapitalis, dalam hal ini pemilik media dan partai golongan tertentu yang berkuasa saat itu.

BAB II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan diangkat di sini tak bisa dilepaskan dari adanya isu gender yang mulai marak di awal tahun 90-an di Indonesia. Utamanya sejak terbentuknya Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi pada 18 Mei 1998, sebagai respons terhadap desakan melakukan reformasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Koalisi Perempuan telah melakukan sekian kegiatan yang merespons berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, politik utamanya yang berkaitan dengan isu-isu feminis manakala terjadi ketimpangan dalam peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum feminis berusaha melakukan identifikasi diri sebagai bagian dari keberpihakan, keikutsertaan, solidaritas kesamaan nasib, dan persamaan penderitaan merupakan suatu cara yang memotivasi seseorang turut dalam perjuangan kolektif. Identitas jenis kelamin adalah hal yang paling dasar dan paling hakiki dari perjuangan perempuan melawan ketertindasannya.

Sehingga permasalahan yang diangkat pada kajian ini adalah: “Bilamanakah media mampu ditekan dalam pemberitaan yang bersifat bias gender dalam kekerasan atau seringkali disebut sebagai pemberitaan *blaming the victim* ?”

BAB.III. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis semiotika untuk mengungkap atau membongkar bagaimana makna teks pada media mampu ditekan dalam pemberitaan yang bersifat bias gender dalam kekerasan atau seringkali disebut sebagai pemberitaan *blaming the victim*. Juga pada akhirnya mampu menjelaskan struktur narasi sehingga mengungkapkan gagasan dominan pada berita *blaming the victim* di media massa. Berita *blaming the victim* di media massa berisu ketidaksetaraan gender yang belum secara seimbang merespon kepentingan para pembacanya utamanya kaum perempuan usia produktif. Dimaksudkan agar pembaca memahami bahwa alur cerita bukanlah sebuah kewajaran manakala terjadi dominasi hubungan seksual atau hubungan yang bersifat relasional dalam sebuah interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode semiotika tidak dipusatkan pada transmisi pesan, melainkan pada penurunan dan pertukaran makna. Penekanannya di sini pada teks dan interaksinya dalam memproduksi dan menerima suatu kultur/budaya ; difokuskan pada peran komunikasi dalam memantapkan dan memelihara nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut dikomunikasikan dan memiliki makna (Fiske, 1990:189).

Berdasarkan pendapat Barthes mengenai analisis naratif menggunakan lima kode pokok (1990:29-31) melihat wacana (bahasa dalam tulisan) sebagai bentuk dari praktik sosial. Analisis ini menggunakan makna yang terbentuk melalui teks pada bahasa untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat, karena ketimpangan kekuasaan tersebut menghasilkan output berita-berita yang rasis dan seksis (kekerasan simbolik berbasis gender). Lima kode pokok tersebut adalah sebagai berikut :

3.1 Kode hermeneutik (hermeneutic code) yaitu merupakan satuan-satuan yang dengan berbagai cara berfungsi untuk mengartikulasikan suatu persoalan, teka-teki atau rahasia, penyelesaian serta aneka peristiwa yang dapat memformulasikan persoalan tersebut, atau justru menunda-nunda penyelesaiannya. Pada dasarnya

kode ini adalah kode penceritaan dalam sebuah narasi dapat mempertajam permasalahan, menciptakan ketegangan dan misteri, sebelum memberikan penyelesaian atau jawaban.

3.2 Kode simbolik (symbolic code) merupakan kode pengelompokan atau konfigurasi antara hidup dan mati, panas dan dingin, pemuda dan usia dan lain sebagainya. Kemunculannya mudah dikenali karena berulang-ulang secara teratur melalui berbagai sarana tekstual.

3.3 Kode proairetik (proairetic code) merupakan kode tindakan yang biasanya dilakukan oleh jurnalis untuk mengkonstruksi narasi menjadi *flashback* (masa lalu) atau berita *blaming the victim* di media massa. Kode ini didasari oleh konsep proairesis yaitu kemampuan untuk menentukan hasil atau akibat dari suatu tindakan secara rasional, yang berimplikasi pada suatu logika perilaku manusia, tindakan-tindakan yang membuahkan dampak, dan masing-masing dampak memiliki nama *generic* tersendiri. Semacam judul bagi sekuens yang bersangkutan.

3.4 Kode rujukan (referential or cultural code) yang berwujud suara kolektif yang anonim dan otontatif bersumber pada pengalaman manusia, yang mewakili atau berbicara tentang sesuatu yang hendak dikukuhkannya sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan yang diterima umum. Kode ini berupa kode-kode pengetahuan atau kearifan (wisdom) yang terus-menerus dirujuk oleh teks atau menyediakan semacam dasar otoritas moral dan ilmiah bagi suatu wacana. Dalam hal ini secara referensial berita yang memiliki unsur *blaming the victim* adalah ragam jurnalistik yang formatnya memiliki narasi yang bisa dianalisis sekaligus memarjinalkan kelompok minoritas (wanita hanya diposisikan sebagai sosok yang salah meskipun sebenarnya adalah korban dalam kejadian kriminal yang dijabarkan dalam sebuah berita yang mengarah pada *blaming the victim*)

3.5 Kode semik (semic code) adalah kode karakter yang berfungsi untuk menyingkapkan kepribadian atau karakter penokohan dalam sebuah cerita atau narasi. Bila diaplikasikan dalam pembacaan sebuah berita yang bersifat *blaming*

the victim secara keseluruhan akan menyingkap apa saja pesan moral yang hendak disampaikan oleh pemuat makna kepada *audiencenya*.

BAB.IV. PEMBAHASAN MASALAH

Seringkali dalam media cetak dan media elektronik atau media *online* kita jumpai kasus *blaming the victim* yang jika kita tak mewaspadainya kita bisa menjadikannya sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Contoh isi media *blaming the victim* bias gender, yang termuat pada harian Meteor (Jumat, 15 Juli 2011);

Dicekoki Miras ABG Diperkosa. Empat Pelaku dibawah umur. Mungkid-Peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar setiap orang tua menjaga dan mendidik anaknya dengan baik. Jangan sampai bernasib seperti **Bunga** (nama samara) yang berusia 13 tahun, warga Desa Balerjo Kec.Kalingangkrik Kab.Magelang ini. Cewek ABG alias anak baru gede ini **mau-mau saja** dipengaruhi untuk minum-minuman keras, dan diajak berhubungan intim oleh teman mainnya. Menurut keterangan, kejadian pemerkosaan itu terjadi, kemarin siang di sebuah bukit di Dusun Giyanti Desa Wonoretno Kecamatan Windusari. Korban datang bersama rekannya ST (13), memenuhi ajakan keempat teman prianya. Masing-masing berinisial AH (16), HM (15), AK (17) dan AD (17), keempatnya warga desa Pasang Sari Kecamatan Windusari. Di tempat yang jauh dari keramaian, dua gadis yang telah putus sekolah itu diajak menenggak minuman keras jenis ciu yang telah dibeli AH. Keenam bocah dibawah umur itu kemudian **pesta miras**. Dalam waktu singkat, dua botol ciu mereka habiskan. Dalam kondisi mabuk tindakan mereka tidak terkontrol. Bahkan AH melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Bunga yang sudah dalam kondisi mabuk berat. "Dia (**Bunga**) **diam saja** saat saya pegang-pegang," tutur AH yang kemarin sudah meringkuk di sel tahanan Mapolres Magelang.

Dalam contoh berita di atas tidak semua lima kode yang diungkapkan Barthes bisa dipakai untuk mengkaji secara semiotik berita *blaming the victim* di atas. Misalnya pada hermeneutic code dimana kode penceritaan dalam sebuah narasi dapat mempertajam permasalahan, menciptakan ketegangan dan misteri, sebelum memberikan penyelesaian atau jawaban. Pada berita di atas secara alurnya terkategori alur antiklimaks. Dimana pada awalnya mereka hanya bertemu tanpa tujuan apapun selain memenuhi ajakan keempat teman prianya. Namun demikian

kedua perempuan ABG dan tiga ABG lelaki pada akhirnya menenggak minuman keras yang sudah dipersiapkan oleh AH (16). Dan terjadilah pemerkosaan karena kondisi keenam ABG yang sudah tak terkontrol lagi.

Sedangkan kode simbolik (symbolic code) merupakan kode pengelompokan atau konfigurasi antara hidup dan mati, panas dan dingin, pemuda dan usia dan lain sebagainya. Kemunculannya mudah dikenali karena berulang-ulang secara teratur melalui berbagai sarana tekstual. Dalam berita di atas bisa diaplikasikan dari jumlah yang tidak seimbang antara jumlah ABG perempuan dan jumlah ABG lelakinya. Yaitu dua berbanding empat, sehingga dapat terasa kelompok perempuan menjadi kelompok yang terdominasi oleh kelompok ABG lelaki.

Kode proairetik (proairetic code) merupakan kode tindakan yang biasanya dilakukan oleh jurnalis untuk mengkonstruksi narasi menjadi *flashback* (masa lalu) atau berita *blaming the victim* di media massa. Kode ini didasari oleh konsep proairesis yaitu kemampuan untuk menentukan hasil atau akibat dari suatu tindakan secara rasional, yang berimplikasi pada suatu logika perilaku manusia, tindakan-tindakan yang membuahkan dampak, dan masing-masing dampak memiliki nama *generic* tersendiri. Semacam judul bagi sekuens yang bersangkutan. Seperti pada berita di atas dapat dianalisis bahwa kata-kata 'bunga diam saja ketika saya raba-raba' sebagai tindakan yang membolehkan atau mengizinkan pemerkosa melakukan aksinya. Sehingga seolah-olah korban pemerkosaan adalah sebagai pihak yang menghendaki kejadian itu terjadi. Adanya kata-kata 'pesta miras' juga mengindikasikan bahwa peristiwa mabuk-mabukkan itu sudah dipersiapkan sebelumnya atau memang sudah direncanakan sebelumnya. Padahal kenyataannya adalah hanya seorang saja yang sudah mempersiapkan minuman kerasnya, yaitu AH.

Kode rujukan (referential or cultural code) yang berwujud suara kolektif yang anonim dan otontatif bersumber pada pengalaman manusia, yang mewakili atau berbicara tentang sesuatu yang hendak dikukuhkannya sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan yang diterima umum. Kode ini berupa kode-kode pengetahuan

atau kearifan (wisdom) yang terus-menerus dirujuk oleh teks atau menyediakan semacam dasar otoritas moral dan ilmiah bagi suatu wacana. Dalam hal ini secara referensial berita yang memiliki unsur *blaming the victim* adalah ragam jurnalistik yang formatnya memiliki narasi yang bisa dianalisis sekaligus memarginalkan kelompok minoritas (wanita hanya diposisikan sebagai sosok yang salah meskipun sebenarnya adalah korban dalam kejadian kriminal yang dijabarkan dalam sebuah berita yang mengarah pada *blaming the victim*). Pada berita di atas kata-kata bahwa **bunga memenuhi ajakan teman-teman prianya untuk bertemu melakukan pesta miras**. Mengindikasikan bahwa bentuk pemerkosaan itu terjadi karena mereka para korban mau.

Kode semik (semic code) adalah kode karakter yang berfungsi untuk menyingkapkan kepribadian atau karakter penokohan dalam sebuah cerita atau narasi. Bila diaplikasikan dalam pembacaan sebuah berita yang bersifat *blaming the victim* secara keseluruhan akan menyingkap apa saja pesan moral yang hendak disampaikan oleh pemuat makna kepada *audiencenya*. Dalam hal ini tidak terdeteksi dalam berita di atas.

Pada tahun 2004 pembantu rumah tangga yang bernama Nirmala Bonat, dari Nusa Tenggara Timur (NTT), berulang kali disiksa oleh majikannya, Yim Pek Ha (40), di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan menggunakan baju besi panas dan air mendidih, menyebabkan luka yang merusak wajah dan tubuhnya. Pada 27 November 2008 Nirwala menerima beberapa kabar baik diantaranya yaitu pengadilan memutuskan bahwa Yim Pek Ha telah didakwa melakukan tindakan penyiksaan sehingga dijatuhi hukuman berat 18 tahun penjara - namun muncul pemberitaan oleh media yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa keanehan dan hal-hal yang mencurigakan "sebelum dan sesudah" gambar Nirmala Bonat di sini . Karena berita tersebutlah yang menjadi kemungkinan penyebab akhirnya belum genap setengah tahun hukuman Yim Pek Ha bisa dilakukan dengan penahanan rumah saja. Nirwala kini telah kembali hidup normal di Kupang, bekerja untuk PT Asuransi Bumi Putra. Lain halnya dengan Nur, 38 tahun, pada April 2006 bertujuan melakukan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja

sebagai pembantu rumah tangga dengan majikan bernama Abdullah M Argani. Sekitar setahun kemudian ia melahirkan seorang anak perempuan, dan mengatakan bahwa dia telah diperkosa oleh keponakan Abdullah. Abdullah dan keluarganya tidak percaya dan melaporkan Nur ke polisi, dan empat hari setelah melahirkan ia dipenjarakan di Ar Ruwais Perempuan 'Pusat Penahanan di Jeddah', dengan alasan kebebasan seksual. Dia dihukum dua tahun penjara dan 2000 pukulan rotan. Aktivis tenaga kerja Indonesia dan pemerintah berusaha untuk bersyafaat atas nama dia dan dia akhirnya menerima hanya 50 cambukan dan dirilis pada akhir Oktober 2008. Sementara di penjara Nur menghubungi suaminya di Puger, Jember, Jawa Timur, dan menyarankan dia untuk menceraikannya dan menikah lagi. Dia juga berusaha untuk menyerahkan anaknya ke keluarga di Arab Saudi, tapi suaminya mengatakan ia bersedia menerima anak itu sebagai miliknya. Nur kembali ke Indonesia pada bulan November, awal tahun 2008 bersama bayi Rani Dwi Lestari, sekarang berusia 18 bulan, dan hidup lagi dengan suaminya di Puger. Tentu saja Nur dianggap bersalah versi media di Jeddah karena ia dianggap melakukan pencemaran nama baik karena dianggap gagal memberikan 4 saksi atas perlakuan pemerkosaan tersebut. Jadi apa yang dia laporkan itu dianggap hanya sebagai fitnah belaka. Dia seharusnya sudah lebih siap sebelum membiarkan dirinya diperkosa, dengan selalu memiliki 4 muslim, disukai, teman-teman arab sekitar untuk menonton pemerkosa. Hal ini diangkat agar bisa menjadi pelajaran padanya, untuk selalu berteman dengan orang Arab, bukan berteman pada bangsa Phillipina atau orang-orang Asia lainnya karena kesaksian mereka tidak akan diperhitungkan. (DetikDeal;November 30th, 2008 at 3:56 am).Dari ketiga contoh berita di atas, sangat jelas bahwa berita yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada khalayak sangat bias gender dengan melakukan *blaming the victim*. Tak hanya bersifat menyalahkan korban tindak kejahatan sebagai sumber masalah tersebut terjadi, namun juga bisa mengubah pola pikir dan opini khalayak pada umumnya untuk ikut serta seperti apa yang dilakukan media. Hal ini bisa diperparah juga manakala para pemegang tampuk kekuasaan terperdaya oleh berita yang justru memojokkan para korban tersebut. Akhirnya justru berakibat fatal dengan meringankan hukuman atau bahkan membebaskan pelaku kejahatan. Jika

tidak, atau bahkan justru memenjarakan korban sebagai sosok yang memang pantas mendapatkan hukuman.

IV.1. Tinjauan Teoritis Studi Budaya

Pendekatan yang digunakan dalam kajian permasalahan *blaming the victim* ini adalah paradig kritis . Pada paradig ini bahasa tidak dipahami sebagai medium netral melainkan sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Karenanya, analisis wacana digunakan untuk menguraikan segala sesuatu yang ada di dalam setiap proses bahasa. Analisis wacana di dalam ilmu komunikasi bersumber dari pemikiran Marxis Kritis. (Stephen W. Littlejohn, 2002; Stanley J. Baran and Denis K. Davis, 2000). Ada tiga aliran pemikiran yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu: (1). Aliran Frankfurt (Frankfurt School); (2). Studi Budaya (Cultural Studies); (3). Studi Wanita (Feminist Study) (Stephen W. Littlejohn, 2002).

Sementara itu, McQuail, yang menitikberatkan perhatiannya kepada pemikiran Marxis secara keseluruhan, mengajukan lima cabang teori yang berkembang di dalamnya yaitu: (1). Teori Marxis Klasik (Classical Marxism); (2) Teori Ekonomi Politik Media (Political Economic Media Theory); (3) Teori Aliran Frankfurt (Frankfurt School); (4) Teori Hegemoni (Hegemonic Theory); (5) Teori Pendekatan Sosial-Budaya (Sociocultural Approach), biasa disebut Studi budaya (Cultural Studies) (McQuail, 1994:115).

Studi budaya (cultural studies) itu sendiri dikatakan John Hartley (2004:41) merupakan kajian tentang :

1. Hubungan antara *kesadaran dan kuasa*-budaya sebagai politik
2. *Identitas*-formasi dalam modernitas-budaya sebagai kehidupan *sehari-hari*
3. Budaya hiburan populer yang *dimediasi*-budaya sebagai teks
4. Ekspansi dari *perbedaan*-budaya sebagai sesuatu hal yang plural

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberitaan *blaming the victim* merupakan kajian budaya tentang identitas dengan memandang konsep permasalahan di atas melalui strukturalis Marxis. Hal ini dimungkinkan karena di dalamnya terdapat salah satu konsep sentral identitas itu sendiri diantaranya yaitu kelas, ideologi, hegemoni, gender, bahasa dan subyektivitas, dengan melakukan pemilihan diksi dalam penyusunan kalimat pada berita yang menimbulkan pengertian yang menjurus pada *blaming the victim* bagi audiencenya, mungkin tanpa disadari oleh para pekerja jurnalis itu sendiri.

Cultural studies menjadikan budaya sebagai area dimana kelas, gender, ras dan kesenjangan lainnya menjadi hal yang bermakna, sadar dan hidup baik melalui resistensi (subkultur) maupun sejenis akomodasi yang dinegosiasikan (audience).

Cultural studies mencoba menghimpun perbedaan budaya dan praktiknya bukan atas referensi nilai intrinsik atau eternalnya, akan tetapi berdasarkan referensi peta relasi sosial keseluruhan (pada siapa ketertarikan ini?). 'Subjek' *cultural studies* bukan lagi 'kondisi manusia' tetapi 'kuasa'. Bentuk cultural studies telah banyak terpengaruhi oleh pergulatannya sendiri untuk memerdekakan konsep yang melekat pada kritik sastra dan seni, dan membuat kritiknya sendiri lebih reflektif (self-reflexive).

Cultural studies sebagian merupakan respons atas pergolakan politik dan intelektual pada tahun 1960-an (yang memandang perkembangan cepat secara internasional dalam strukturalisme, semiotik, Marxisme dan feminisme) dan memasuki periode intensif dari kerja teoritis dengan tujuan memahami bagaimana budaya (produksi sosial atas rasa dan kesadaran) seharusnya ditentukan dalam dirinya sendiri dan dalam relasinya dengan ekonomi (produksi) dan politik (hubungan sosial).

Teori utama yang sesuai dengan kasus *blaming the victim* ini adalah *muted group theory*. Dimana teori ini berawal dari Edwin dan Stinley Ardener pada Charlotte Krollokke dan Anne Scot Sorensen (2006:29-30), antropologis sosial Oxford University yang melihat bahwa ternyata para antropolog melakukan

penelitiannya dengan lebih banyak berbicara dan bertanya kepada kaum pria dewasa pada suatu budaya tertentu untuk kemudian mencatatnya dalam etnografi sebagai gambaran budaya secara keseluruhan.

Ardener awalnya berasumsi bahwa kurangnya perhatian terhadap pengalaman perempuan adalah sebuah masalah gender yang unik pada antropologi sosial. Tetapi hal ini kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh rekan kerjanya Shirley Ardener, yang menyadari bahwa kebungkaman kelompok yang kurang kekuasaan menimpa kelompok-kelompok yang menempati tempat yang paling akhir dari tingkatan masyarakat.

Orang-orang yang hanya memiliki kekuasaan yang rendah bermasalah dengan persoalan menyuarakan persepsi-persepsi mereka. Teori kelompok yang dibungkam ini kemudian dikembangkan secara lebih lengkap oleh Cherris Kramarae, seorang professor komunikasi dan sosiolog di Universitas Illinois, sekaligus seorang professor tamu di Pusat Studi Perempuan (center for Studi of Women) di Universitas Oregon. Baru-baru ini menjabat sebagai dekan di Universitas Perempuan Internasional (The International Woman's University) di Jerman. Dia memulai karier penelitiannya pada tahun 1977 ketika memimpin sebuah studi sistematis mengenai cara-cara perempuan diluluskan dalam kartun Kramarae (1981).

Tiga (3) asumsi yang berpusat pada sajian feminisnya dari teori kelompok yang dibungkam yaitu ;

1. Perempuan merasakan dunia yang berbeda dari pria karena perempuan dan pria memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Pengalaman yang berbeda ini berakar terhadap devisi kerja masyarakat.
2. Kaum pria merupakan kelompok yang dominan di masyarakat sistem persepsi mereka yang juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan.
3. Sehingga agar berpartisipasi dalam masyarakat perempuan harus mentransformasi modelnya dalam terminologi sistem ekspresi yang dominan tersebut.

Pemberitaan *blaming the victim* ini sangat serasi juga bilamana dikaitkan dengan teori Feminisme Gender, yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan tumbuh menjadi laki-laki dan perempuan dewasa dengan nilai-nilai dan kebaikan gender yang khas yang (1) merefleksikan pentingnya keterpisahan pada kehidupan laki-laki dan pentingnya keterikatan pada kehidupan perempuan (2) berfungsi untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan dalam masyarakat patriarkial (Rosemarie Putnam Tong, 2006:224). Teori yang lain adalah feminis global yang berpandangan bahwa dengan menyetarakan penalaran relativisme etis, teori yang menyatakan bahwa pertimbangan etis hanya dapat diterapkan pada waktu dan tempat pertimbangan itu muncul, perlu menggantikan absolutisme etis berlaku setiap waktu dan pada setiap tempat (Tong, 2006:347).

Berkaitan dengan *blaming the victim* yang berfokus pada kekerasan seksual tak bisa dilepaskan dari hasrat biologis yang dimiliki oleh kaum pria yang dikenal sebagai *sleep-sex*. Aquarini dalam Pradopo (1997:24) menyampaikan bahwa melalui diskusi wacana biologi/patologi/kriminal, *sleep-sex* cenderung untuk dianggap sebagai suatu fenomena biologis. Dalam kasus ketika hal itu menjadi suatu tindak kriminal, *sleep-sex* cenderung dianggap patologis. Pada akhirnya, wacana perkosaan dikebelakangkan melalui wacana biologi/patologi.

IV.2. Menyerah atau Melawan

Pada pemberitaan media massa yang bersifat *blaming the victim* dapat di aplikasikan juga analisis permasalahan perempuan dalam karya sastra Wolf dalam Sofia (2009:17) membagi pendekatan feminisme dalam dua hal, yaitu feminis korban (*victim feminism*) dan feminis kekuasaan (*power feminism*). Feminisme korban melihat wanita dalam peran seksual yang murni dan mistis, dipandu oleh naluri untuk mengasuh dan memelihara, serta menekankan kejahatan-kejahatan yang terjadi atas wanita sebagai jalan untuk menuntut hak-hak wanita. Sedangkan feminis kekuasaan menganggap wanita sebagai manusia biasa yang seksual, individual, tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi mitranya dan mengklaim hak-haknya atas dasar logika yang sederhana, yaitu wanita memang memiliki hak.

Pada pendekatan feminis korban, laki-laki menjadikan wanita sebagai objek dan mengklaim bahwa wanita tidak pernah berbuat sebaliknya pada laki-laki. Selain itu, pria dianggap suka berpoligami dan hanya mengejar sesuatu yang tampak. Sedangkan wanita dipandang monogami dan mementingkan emosi. Dengan demikian, pria egois dan tidak pernah setia, sedangkan wanita tidak pernah tergoda dan setia. Menurut Wolf (Sofia, 2009:18) dengan adanya gegar gender (*genderquake*), yaitu tumbuhnya kesadaran tentang kesetaraan yang meluas di masyarakat, tumbuh pulalah kesadaran-kesadaran bahwa wanita bukanlah minoritas, wanita tidak perlu mengemis kepada siapapun untuk membonceng pesawat politik atau dalam bentuk apapun, wanita mampu membuat segala sesuatu terjadi, dan keadilan serta kesetaraan bukan merupakan sesuatu yang dimohon dari orang lain.

Pada saat kondisi kejiwaan dan kehidupan wanita telah berubah, dorongan untuk mendominasi, menyerang, dan mengeksploitasi orang lain bukan lagi menjadi milik laki-laki sehingga feminis korban menjadi usang. Gegar gender (*genderquake*) telah membuat wanita melihat citra kemenangan. Kemenangan dalam hal ini bukan berarti menang atas laki-laki, melainkan menang atas impian wanita sendiri. Impian itupun tertumpah dan tersalurkan melalui pernyataan-pernyataan dalam sebuah konflik, dalam sebuah hubungan. Selanjutnya Wolf juga mengemukakan bahwa pada dekade 1990-an mulai muncul citra wanita sebagai pemegang kekuasaan yang telah membebaskan wanita untuk membayangkan diri mereka sebagai makhluk yang tidak hanya menarik dan memberi perasaan ingin menyayangi, melainkan juga bisa menimbulkan rasa hormat, bahkan rasa takut.

Sementara itu, citra yang mendorong ke arah aksi adalah citra tentang agresivitas, keahlian, dan tantangan, ketimbang pencitraan tentang korban. Oleh karena itu yang diperlukan untuk menganalisa wanita-wanita yang memahami kekuatan dirinya adalah pendekatan yang luwes yang menggunakan dasar perdamaian, bukan dasar perang dalam perjuangan meraih hak setara. Pendekatan ini bersifat terbuka dan menghormati laki-laki serta dapat mengadakan ketidaksukaan pada seksisme dengan ketidaksukaan pada laki-laki. Prinsip-prinsip

pendekatan feminis kekuasaan menurut pemikiran Wolf adalah sebagai berikut; (1) wanita dan laki-laki mempunyai arti yang sama besar dalam kehidupan manusia (2) wanita berhak menentukan nasibnya sendiri (3) pengalaman-pengalaman wanita mempunyai makna, bukan sekedar omong kosong (4) wanita berhak mengungkapkan kebenaran tentang pengalaman-pengalaman mereka (5) wanita layak menerima lebih banyak segala sesuatu yang tidak mereka punya karena kewanitaan mereka, seperti rasa hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, pendidikan, keselamatan, kesehatan, keterwakilan, dan keuangan (Sofia,2009:22).

Dengan demikian, pendekatan feminis kekuasaan tidak memusuhi laki-laki dan menganggap laki-laki tidak terpisah dari perjuangan bahkan mitra wanita dalam perjuangan menuju kesetaraan sosial. Kelebihan pendekatan ini adalah memperlakukan wanita sebagai manusia dan memperlakukan laki-laki sebagai manusia. Sementara itu kekurangannya adalah terlalu menekankan kemandirian pribadi dan individualitas sehingga memungkinkan wanita-wanita yang tidak sukses dan kurang beruntung dapat terlewatkan begitu saja. Pengungkapan citra wanita dengan kekuasaan harus dilakukan agar membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengenali citra dirinya sendiri di antara citra-citra yang ada. Dengan cara yang sama sederet citra positif yang beraneka tentang feminis akan memberi kesempatan pada wanita untuk mengenali diri sendiri dan konotasi feminis dapat berubah menjadi pemahaman sebagai manusia. Melalui pemikiran Wolf tentang *power feminis* (feminis kekuasaan) di atas, pihak yang memiliki power atau sikap-sikap kuasa dipandang sebagai pihak yang kuasa, dalam hal ini pihak tersebut ditampilkan dalam frase wanita kuasa.

Berkaitan dengan *blaming the victim* yang penulis teliti terdapat beberapa kesesuaian dengan teori di atas yang belum dijelaskan pada feminis radikal kultural, di antaranya dilihat dari sisi feminis korban bahwa; (1) laki-laki menjadikan wanita sebagai objek dan mengklaim bahwa wanita tidak pernah berbuat sebaliknya pada laki-laki, karena ketidakmampuan wanita itu sendiri baik secara agama, historis, fisik, psikis dan ekonomi (2) citra wanita dipandang laki-

laki sebagai sosok yang sama sekali tak memiliki agresivitas, keahlian, dan tertantang untuk melakukan aksi balik.

Sedangkan ditinjau dari feminis kekuasaan terdapat keterkaitan teori ini dengan *blaming the victim* yang dilakukan, diantaranya; (1) wanita dan laki-laki mempunyai arti yang sama besar dalam kehidupan manusia, dalam hal ini kehidupan berumah tangga sehingga sudah sewajarnya mereka bahu-membahu saling mengisi kekurangan dan mengakui kelebihan serta menghargai setiap kontribusi yang dilakukan baik dari sisi laki-laki ataupun perempuan (2) wanita berhak menentukan nasibnya sendiri, sehingga ketika upayanya dalam melakukan peran tambahan sebagai pekerja yang mampu memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan kepada keluarganya namun masih mengalami ketidaksetaraan hubungan, maka ia berhak dan harus berani memutuskan untuk bisa mandiri walau tanpa pendamping hidup, sehingga kasus-kasus serti itu di masa mendatang dapat diredam (3) wanita layak menerima lebih banyak segala sesuatu yang tidak mereka punya karena kewanitaan mereka, seperti rasa hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, pendidikan, keselamatan, kesehatan, keterwakilan, dan keuangan. Karena dalam beberapa *blaming the victim* dalam penelitian ini, wanita pekerja yang mengalaminya serta mengungkapkan kejadian tersebut kepada orang terdekatnya (saudara kandung, ibu kandung, ayah kandung, ibu mertua dan saudara ipar) justru mendapatkan pemberitaan yang mengarah pada menyalahkan mereka sebagai sumber tindak kriminal yang saat itu terjadi. Bahkan perilaku, sikap dan tindakan para korban tersebut sebagai alasan mengapa tindakan kriminal itu bisa terjadi. Dan sayangnya media tidak membela ketidakseimbangan ini, bahkan terkesan ikut serta melakukan *blaming the victim* pada fenomena seperti ini.

IV.3. Ideologi Patriarki

Dalam penelitian ini juga sangat relevan jika menggunakan teori pendukung di antaranya adalah ideologi dari pemikiran Raymond William dan Louis Althusser yang memaknai suatu berita. Makna itu diproduksi melalui proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks berita secara bersama-sama mempunyai andil yang sama dalam memproduksi

pemaknaan, dan hubungan tersebut menempatkan khalayak pembaca sebagai suatu hubungan dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar dimana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja (Fiske, 1990:164).

Ada banyak ideologi yang oleh Raymond William mengklasifikasikannya menjadi 3 ranah. **Pertama**, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan dalam bentuk yang koheren. Ideologi di sini seakan-akan terlihat sebagai perwujudan dari sikap seseorang, tetapi sistem nilai ini tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu yang berasal dari diri individu itu sendiri, melainkan sesuatu yang diterima dari masyarakat. Ideologi bukan sistem unik yang dibentuk oleh pengalaman seseorang, namun ditentukan oleh masyarakat di mana ia hidup, posisi sosialnya, dan pembagian kerja dan lain sebagainya. Jika diaplikasikan dalam penelitian ini, para praktisi jurnalis yang melakukan *blaming the victim* di media massa. **Kedua**, ideologi sebagai sistem kepercayaan yang dibuat –ide atau kesadaran palsu- yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Dalam konsepsi Karl Marx, ideologi juga disebutkan sebagai sebutuk kesadaran palsu. Kesadaran seseorang, siapapun dirinya dan bagaimana menghubungkan dirinya dengan masyarakat, dibentuk dan diproduksi oleh masyarakat, tidak oleh biologi yang alamiah. Konsep ideologi dalam konteks ini dapat pula berupa seperangkat kategori yang dibuat dan menjadi kesadaran palsu dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. Karena kelompok yang dominan mengontrol kelompok yang lain dengan menggunakan perangkat ideologi yang disebarkan ke dalam masyarakat, akan membuat kelompok yang didominasi melihat hubungan itu akan tampak natural, dan menerimanya sebagai kebenaran.

Untuk konteks ini, ideologi disebarkan melalui berbagai instrumen dari pendidikan, politik, budaya sampai media massa. Ideologi jenis ini bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial tampak nyata, wajar, alamiah dan tanpa kita sadari menerimanya sebagai kebenaran. Salah satu contoh laporan *blaming the victim* memuat alur seorang istri pekerja yang juga berprofesi sebagai pembantu

rumah tangga, ri tuturan alur ceritanya saja pembaca sudah dapat memprediksikan bahwa hubungan yang terjadi dalam sebuah keluarga tersebut dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah keberadaan biaya atau ongkos operasional sebuah keluarga yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama tersebut adalah hasil keringat istri dengan alasan gaji suami tak lebih banyak dari gaji istri. Dengan adanya sikap diam karena keluhan, dan ketidakberdayaan melalui tangisan kesedihan dan kekecewaan yang dialami istri tak mendapat tanggapan dari suami, justru sang suami mengimbangi dan menerima itu sebagai sebuah penerimaan dari istri. Bahkan secara sewenang-wenang menganggap bahwa pria adalah sosok yang pantas untuk dipuja dalam sebuah keluarga manapun.

Oleh karena itu, ideologi selalu berpretensi untuk melanggengkan status quo, yang mengilustrasikan kelompok dominan yang lebih bagus dibandingkan kelompok minoritas dan meskipun struktur hubungan tersebut berlangsung dalam hubungan yang timpang dan dominan, kita tidak pernah mempertanyakannya. Dengan kata lain, teks berita hiburan berupa cerita fiksi ini menempatkan pembaca pada posisi ideologi dominan yang menerima realita pemberitaan tersebut secara natural dan fair. **Ketiga**, ideologi dapat ditanggapi sebagai proses umum dari produksi makna dan ide. Berita secara ideologis merupakan bentuk dari kapitalis. Kekuatan kapital dianggap dan dipandang paling berperan dalam produksi masyarakat. Bagaimana ideologi ini bekerja dalam memproduksi makna dapat terlihat dari bagaimana posisi pelaku dalam cerita fiksi tersebut dikonstruksi dalam bentuk berita hiburan.

Informasi media yang ikut memposisikan wanita sebagai objek dan atau sekaligus penggoda secara seksual ini, dapat dikaitkan dengan budaya patriarkial yang berkembang dan dominan di masyarakat. Dikarenakan media hidup di tengah-tengah budaya patriarki, maka nilai-nilai beritanya lebih fokus pada budaya tersebut, dalam rangka mempertahankan khalayak pembaca, memperoleh keuntungan dan melindungi kehidupan kapitalis perusahaan media. Untuk budaya patriarki ini dapat dipahami sebagai suatu sistem budaya sosial yang memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, dimana seolah-olah

melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang dilakukan pelaku (pria) atas hak asasi wanita hanya sebagai obyek dan atau sekaligus penggoda secara seksual semata

IV.2. Pemilihan Diksi Pada Kalimat Berita *Blaming The Victim*

Dalam teks, maskulinitas ditunjukkan sebagai suatu hal yang secara alamiah agresif dan tidak dapat dikendalikan dan laki-laki pada umumnya tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas dorongan seksualnya. Meskipun demikian, ada juga isyarat gambaran maskulinitas sebagai ketidakberdayaan dan kelemahan dan karena itu membutuhkan bantuan feminis.

Dari kata-kata yang dicetak miring *Bunga, mau-mau saja, pesta miras dan bunga diam saja* adalah teks media yang bias gender yang dikategorikan *blaming the victim*. Kata **bunga**, seolah memang perempuan pantas dipetik ketika beranjak dewasa, *mau-mau saja, pesta miras dan bunga diam saja* saja seolah itu kesepakatan kedua belah pihak, padahal merupakan akal bulus atau kelicikan dari segelintir orang saja.

Sedangkan kalimat yang benar-benar mencerminkan adanya *blaming the victim* adalah pada ; “Peristiwa ini bisa menjadi peringatan agar setiap orang tua menjaga dan mendidik anaknya dengan baik. Jangan sampai bernasib seperti **Bunga** (nama samara) yang berusia 13 tahun”. Dari kalimat tersebut seolah-olah kejadian kekerasan seksual yang menimpa gadis adalah karena tidak adanya penjagaan yang ketat dari kedua orang tua si gadis. Jika demikian tak hanya yang dipersalahkan di sini adalah korban saja, sudah pula merembet mempersalahkan hal tersebut terjadi karena kesalahan keluarganya, dalam hal ini keluarga.

Dari uraian pemilihan diksi pada contoh di atas membuktikan adanya terjadinya peranan atribusi dalam media. Atribusi media dari peran realitas terdefinisi dengan pintu masuk media pada dua proposisi. *Yang pertama* adalah bahwa berita adalah produk yang diproduksi, belum tentu dalam arti bahwa itu adalah dibikin atau ditemukan tetapi dalam arti bahwa itu adalah produk dari

budaya dikodekan dan sosial ditentukan proses pembuatan yang menampilkan, dalam konteks/ isi dan bentuk, kekuatan teknis dan ideologis yang menanggung beberapa konstruksi. *Yang kedua* adalah bahwa kekuatan yang berasal dari media memiliki kemampuan mendefinisikan realitas yang terjadi pada mereka dengan layanan yang mereka tampilkan memposisikan kita para saksi langsung peristiwa-peristiwa yang kita tidak punya kemampuan sebagai tangan pertama dalam hal pengetahuan atau pengalaman.

Dalam *konsep blame the victim* ini, yang sangat mengkhawatirkan selain tak hanya bersifat menyalahkan korban, korban juga dianggap sebagai pemicu/perangsang bagi terjadinya tindak kejahatan tersebut terjadi, namun juga bisa mengubah pola pikir dan opini khalayak pada umumnya untuk ikut serta seperti apa yang dilakukan media.

IV.3. Solusi yang Bisa Ditempuh

Para pekerja media seharusnya lebih sensitif gender, jika memang secara budaya sebagai Bangsa Timur yang sangat terhegemoni pemikiran patriarkial dan tak mudah melakukannya paling tidak mereka memahami dan menerapkan perundangan dalam kegiatan jurnalistik yang sangat mendukung gerakan feminis ini. Diantaranya yaitu :

1. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Archie Sudiarti Luhulima (2007:ix) bahwa hak perempuan harus dilindungi dan ditegakkan seperti dimuat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditegaskan kewajiban perlindungan dan penegakannya dalam Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, dan dalam Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No.7 tahun 1984)

2. Memahami bahwa tindak kekerasan sebagai diskriminasi, seperti halnya yang disampaikan oleh Erna Sofwan Sjukrie, dimana pada pasal 1 Konvensi Wanita dan Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Dimana menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan termasuk di sini

kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada perempuan, karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya (2007:x)

3. Memahami tentang Deklarasi Wina dan Program aksi yang disetujui pada tanggal 25 Juni 1993 oleh Konvensi Dunia Hak Asasi Manusi.

4. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993

5. UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

6. Serta dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian pula halnya dengan kewajiban penegakan hak perempuan yang ditentukan dalam Undang Undang Dasar 1945 Hasil amandemen.

7. Memahami tentang Hak Kesehatan Perempuan, Utamanya Kesehatan Reproduksi Perempuan, menurut Pasal 12 Konvensi Wanita. Hak kesehatan reproduksi perempuan dijamin pula dalam Pasal 4(2), Pasal 10(h) dan Pasal 11(2) Konvensi Wanita. Dikemukakan bahwa kesehatan perempuan, dijamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan dijamin pula dalam Deklarasi International Conference on Population and Development (ICPD) 1994, yang meliputi (1) Hak individu untuk menentukan kapan ia akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan berapa lama jarak tiap-tiap kelahiran anak (2) Hak untuk mendapat pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya (3) Hak untuk mendapat informasi, komunikasi dan edukasi berkaitan dengan hak tersebut, dan (4) Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

8. Memahami UUD 1945 Hasil Amandemen tentang UU Hak asasi Manusia dan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang secara tegas memberikan perlindungan atas hak perempuan di bidang sosial dan ekonomi, serta hak perempuan pedesaan untuk kehidupan yang layak, berpartisipasi dalam dan

mendapat manfaat yang sama dengan laki-laki dari pembangunan pedesaan sangat berkaitan dengan upaya penghapusan kemiskinan.

BAB.IV. PENUTUP

Mungkin masih banyak hal lain yang bisa menjadi faktor mengapa kekerasan dan kesewenangan gender sulit untuk dituntaskan. Yang pasti pendidikan, penyuluhan pemerintah tentang makna emansipasi sebenarnya, peningkatan pengetahuan moral dan agama serta kesadaran perempuan untuk menjaga diri sendiri bisa menjadi solusi untuk mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terpenting lagi solusi tersebut bisa mulai diaplikasikan dengan sangat mudah dimulai dari diri perempuan itu sendiri.

Tidak memerlukan banyak tenaga, uang, dan pertentangan publik atau media. Caranya adalah hanya dengan melakukan hal-hal kecil yang selama ini kita anggap sepele. Seperti memperhatikan cara berpakaian yang tidak mengundang hasrat pria untuk melakukan pelecehan seksual, jika wanita ingin dihormati maka berpakaian yang membuat pria segan untuk mengganggu. Lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca buku yang dapat memperluas wawasan. Siapapun yang berwawasan luas akan mudah diterima di lingkungan kerja terhormat manapun.

Sehingga tidak perlu lagi ada perempuan yang hanya dengan modal nekat menjadi TKW di negeri orang dan mendapat kesewenangan dari majikannya. Mengajarkan budi-pekerti dan pengetahuan agama di rumah kepada seluruh anggota keluarga, dan memperingatkan diri sendiri serta anggota keluarga (terutama perempuan) untuk tidak berada di luar rumah pada larut malam untuk mengurangi angka kriminalitas terutama terhadap perempuan, perlu juga ditempuh. Jika hal-hal yang selama ini kita anggap sepele itu sudah bisa dilakukan oleh semua orang di Indonesia besar kemungkinan sebagian masalah gender akan dapat terselesaikan. Karena sebaik apapun pemerintah memberi kebijakan tentang sebuah masalah apabila dalam diri masing-masing orang tidak memiliki kesadaran untuk

menyelesaikan masalah yang sebenarnya sebagian besar ada dalam diri sendiri, hasilnya tidak akan pernah tercapai.

Namun demikian, tak bisa juga dipungkiri peran media sangat besar dalam *memblow up* sebuah berita. Kepedulian dengan studi lembaga media, praktek pekerjaan mereka dan hubungan dengan lingkungan sosio-politik mereka, muncul sebagai arus utama penelitian komunikasi massa dalam dua dekade terakhir. **pertama**, perkembangan ideologis kategori dan kerangka acuan di mana orang-orang memahami dunia. Berkembang dari konsepsi relatif terbatas 'agenda setting' media (Peringkat masalah, dalam hal kepentingan yang mereka pahami) dalam pemilihan studi, minat baru telah dikembangkan dalam 'efek kognitif' yang lebih luas dari media yang mencerminkan ketidakpuasan hampir universal di antara peneliti dengan konseptualisasi sempit media dipengaruhi oleh efek klasik studi. Selain itu struktur organisasi dan perilaku, serta alat-alat analisis, yang terlihat dapat diterapkan untuk mempelajari organisasi media dan praktek pekerjaan mereka dan proses produksi. **Kedua**, meningkatnya pengaruh Marxis berteori, dengan tantangan untuk model pluralis kekuasaan dalam masyarakat, mendorong penilaian kembali peran media dalam masyarakat, dan perhatian difokuskan pada struktur dan organisasi media. Media datang untuk dilihat, dalam hal ini perspektif, bukan sebagai sistem organisasi otonom, tetapi sebagai satu set lembaga terkait erat dengan struktur kekuasaan dominan melalui kepemilikan, hukum peraturan, nilai-nilai yang tersirat dalam ideologi profesional dalam media, dan struktur dan konsekuensi ideologis dari mode yang berlaku **Ketiga**, meningkatkan perhatian untuk mempelajari peran massa media dalam politik menunjukkan pentingnya meneliti hubungan antara lembaga media dan lembaga-lembaga politik masyarakat, dan cara-cara komunikasi politik muncul sebagai produk komposit hasil interaksi antara dua set lembaga. Ini mengakibatkan pengaruh yang berbeda pasti, tidak dalam satu set terpadu dalam kepentingan, tetapi dalam pemeriksaan aspek yang berbeda dari lembaga media.

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pekerja media pada umumnya masih belum memiliki sensitivitas gender sehingga seringkali

masih memberitakan informasi yang bias gender seperti halnya pemberitaan *blaming the victim*. Sehingga perlu kiranya dilakukan *literacy feminism* kepada para jurnalis secara nasional oleh para penggiat feminis itu sendiri yang tentunya secara melembaga dimediasikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA :

- Archi, SL. 2007. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta : UI & Yayasan Obor
- Barthes, Roland.1990.S/Z.United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd
- Hartley, John.2004. *Communication, Cultural, and Media Studies: The Key Concepts*. London: Routledge.
- McQuail, Denis.1994.*McQuail's Mass Communication Theory*,6 th.ed.London: Sage
- Pradopo, Rachmat Djoko.1997. Pengkajian Puisi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sorensen, Anne Scott and Charlotte Krolokke. 2006. *Gender Communication Theories and Analysis*. Thousand Oaks, California :Sage Publications, Inc.
- Fiske, John.1990.*Cultural and Communication Studies:Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Penerjemah Yosol Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta:Jalasutra.
- Tong, Rosemarie Putnam.2006. *Feminis Thought, Pengantar Paling Komprehensif kepada arus Utama Pemikiran Feminis* (Versi Terjemahan, cetakan)
- Sofia, Adib.2009.*Aplikasi Kritik Sastra Feminis : Perempuan dalam Karya-karya Kuntowijoyo*. Yogyakarta:Citra Pustaka